

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut ulasan sebelumnya mengenai seberapa efektif aplikasi sistem informasi perencanaan dan harga (SIPAGA) digunakan dalam mendukung Prosedur Penyusunan RKBMD Pada BPKAD Provinsi Sumatra Barat, maka Penulis dapat menarik Kesimpulan :

1. Penggunaan Aplikasi SIPAGA sangat berguna oleh seluruh OPD yang ada di lingkungan Sumatra barat dalam perencanaan suatu kebutuhan barang Milik daerah yang diwujudkan dalam dokumen RKBMD.
2. Kendala yang pernah terjadi adalah adanya pergantian Sumber Daya Manusia yang cukup sering pada bagian pengurus barang yang menggunakan aplikasi SIPAGA dalam penyusunan RKBMD. Ketika Pengurus barang dari suatu Organisasi Perangkat daerah (OPD) berganti, hal ini mengakibatkan ketidakpahaman mengenai tata cara pengaplikasian SIPAGA dalam penyusunan RKBMD. Proses sosialisasi kembali tentang penggunaan aplikasi SIPAGA terkait penyusunan dan pengusulan RKBMD tentunya memerlukan waktu. Oleh karena itu, sebaiknya pergantian pengelola barang yang bertanggung jawab dalam pengusulan RKBMD tidak terjadi terlalu sering.
3. Keterlambatan dalam pengusulan RKBMD sangatlah krusial sebab, hal ini akan mengakibatkan dan mempengaruhi proses telaah dan penetapan

RKBMD sehingga jadi tertunda oleh sebab itu perlu perbaikan Standart Operating Procedures (SOP) untuk meningkatkan koordinasi internal antar SKPD di lingkungan pemerintahan provinsi Sumatra Barat agar penyusunan dan pengusulan RKBMD dilakukan secara tepat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan Jabaran Pembahasan diatas tentang Efektifitas Penggunaan Aplikasi Sistem Perencanaan Barang dan Harga (SIPAGA) dalam Mendukung Prosedur Penyusunan RKBMD Pada BPKAD Provinsi Sumatra Barat, maka penulis memberikan saran diantaranya;

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu merancang pedoman jenjang karir dan mengkomunikasikannya kepada semua karyawan. Untuk meningkatkan kopetensi karyawan, perlu dilakukan pelatihan yang konsisten dan pengembangan layanan yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan aplikasi SIPAGA. Dengan demikian, mereka akan memiliki keterampilan yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Memastikan agar tidak seringnya terjadi pergantian Pengguna barang sebagai SDM yang mengusulkan RKBMD, Oleh karena itu seharusnya jangan sering terjadi pergantia Pengelola barang yang memiliki tanggung jawab untuk mengajukan rencana kebutuhan Barang (RKBMD).
3. Perbaiki Standard Operating Procedures (SOP) agar terbangunnya koordinasi internal SKPD yang baik sehingga penyusunan dan pengajuan usulan RKBMD dapat dilakukan secara tepat waktu dan terstruktur.